

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat 3 (tiga) tahapan utama mengenai mekanisme atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten yaitu pendaftaran, penetapan, dan pembayaran/penyetoran. Dalam hal mekanisme atas pemungutan PBB-P2 saat kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Klaten tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dimana pemungutan saat kondisi pandemi Covid-19 lebih difokuskan pada pembayaran secara online.
2. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan saat kondisi di Kabupaten Klaten pandemi Covid-19 memiliki persentase diatas 100% yang artinya memenuhi anggaran atau target yang telah ditetapkan. Tercapainya target tersebut menggambarkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 pada saat kondisi Covid-19 di Kabupaten Klaten berada pada tingkat yang sangat efektif.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai komponen bagian Pajak Daerah memberikan kontribusi untuk membantu peningkatan Pendapatan

Asli Daerah. Dalam hal ini nilai kontribusi penerimaan PBB-P2 saat kondisi pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya kontribusi PBB-P2 saat kondisi pandemi Covid-19 menggambarkan bahwa PBB-P2 mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten saat kondisi pandemi terjadi.

4. Terdapat 4 (empat) strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten guna mewujudkan penerimaan PBB-P2 yang optimal saat kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Klaten. Strategi-strategi tersebut adalah pemberian insentif pembebasan denda untuk tunggakan PBB-P2. Lalu dilakukannya intensifikasi untuk memberikan informasi kepada wajib pajak serta memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak. Kemudian penggunaan teknologi agar pemungutan yang dilakukan lebih efektif serta efisien. Terakhir adalah bekerjasama dengan Pemerintah Desa guna memudahkan pemungutan PBB-P2 dalam masyarakat.